



**SURAT TUGAS**

No. 214/F.3-UMJ/III/2023

میحررلاً ن محررلاً اللہ آ مسب

Assalamu'alaikum w.w.

Teriring salam dan do'a semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan dapat menjalankan aktifitas sehari-hari, Aamiin.

Pimpinan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan ini menugaskan kepada :

**Litdia, S.E., M.Si., Ak., CA**

Untuk menghadiri acara *Webinar* Konsorsium IA-PTM/A Penerapan ISAK 35 dalam Laporan Keuangan PTMA yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 11 Maret 2023

Waktu : 09.00 – 13.00 Wib

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dilaksanakan sebagai amanah.

Wabillahittaufiq walhidayah.

Wassalamu'alaikum w.w.

Jakarta, 9 Maret 2023

Dekan,  
  
**Dr. Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak**  
**NID : 20 931**



# Sertifikat

NOMOR: 1/V.5/JM/2023

Diberikan Kepada :

**Litdia SE. M.Si. Ak. CA**

Sebagai :

## Peserta

**Webinar Konsorsium IA-PTM/A  
Penerapan ISAK 35 dalam Laporan Keuangan PTMA  
yang dilaksanakan secara daring (melalui zoom)  
pada tanggal 11 Maret 2023**



Dr. Wahyudi Setiawan, M.Pd.I  
Ketua Penyelenggara



Dra. Rina Trisnawati, M.Si. Ak, Ph.D. CA  
Ketua Konsorsium IA-PTM/A



# LAPORAN KEUANGAN ENTITAS BERORIENTASI NON LABA

# Agenda



**Organisasi Sektor Publik**

**PSAK 45 Pelaporan Entitas Nirlaba**

**ISAK 35 Penyajian Laporan Keuangan  
Entitas Berorientasi Non Laba**

**Isu Entitas Non Laba**



# ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

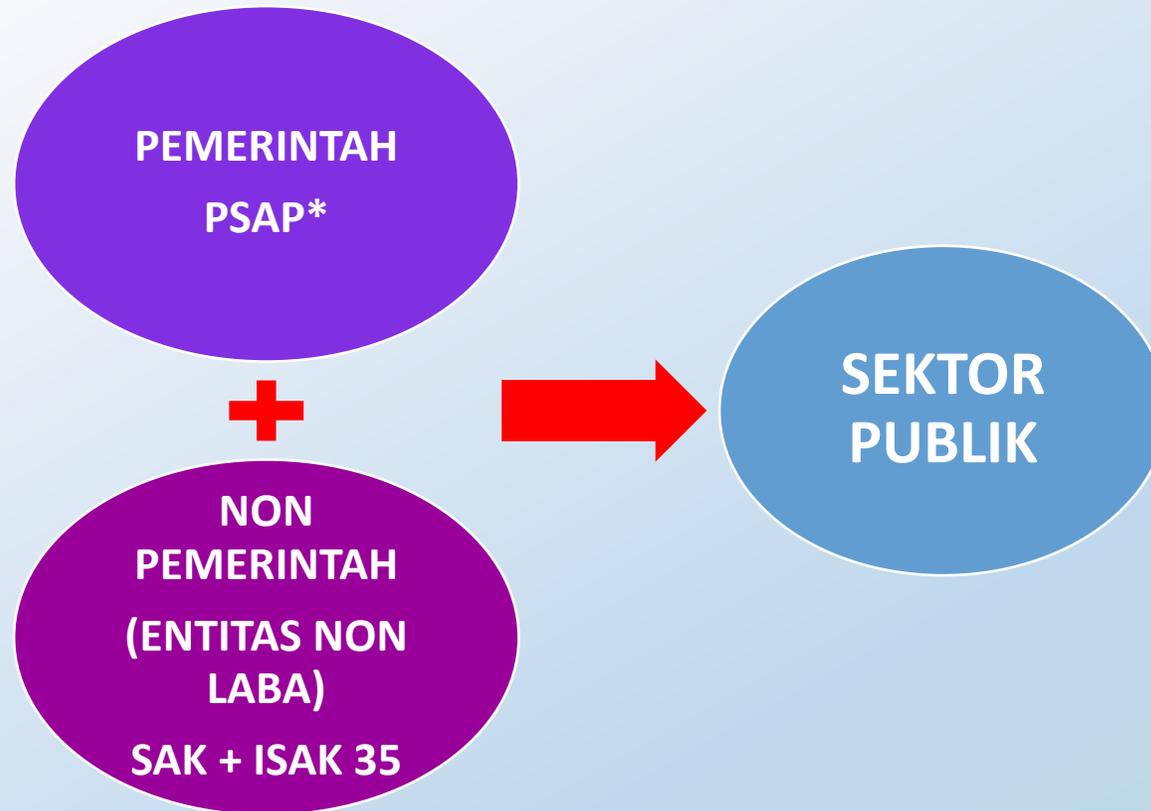
# MENGAPA BELAJAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

- Bekerja di Pemerintah dan Entitas Non Laba
  - Menyusun laporan keuangan untuk akuntabilitas dan transparansi
  - Aktivitas terkait dengan keuangan: anggaran, penerimaan dan pengeluaran kas. Pendapatan, beban dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki.
- Sebagai anggota masyarakat
  - Memahami APBN dan Realisasi APBN
  - Memahami belanja negara digunakan untuk apa
  - Memahami penerimaan negara dari mana
  - Yayasan dan Ormas memperoleh dana dari mana, akuntabilitasnya bagaimana
- Memberikan konsultasi atau Mengaudit Organisasi Sektor Publik
  - Memahami mekanisme dan sistem keuangan negara
  - Memberikan jasa konsultasi pada instansi pemerintah – penyusunan sistem, penyusunan pedoman akuntansi, kebijakan akuntansi, konsultasi manajemen
  - Melakukan audit : audit laporan keuangan atau audit operasional
  - Klien sektor publik: Yayasan, organisasi kemasyarakatan



# SEKTOR PUBLIK

## AKUNTANSI PADA



- Akuntansi Keuangan
- Akuntansi Manajemen
- Sistem Informasi Akuntansi

Standar Akuntansi Keuangan yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan:

\* Pemerintah → Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)

\*\*Entitas Non Pemerintah menggunakan SAK dan ISAK 35

Secara internasional terdapat *Public Sector Accounting Standard (IPSAS)*

# ENTITAS PUBLIK

- Entitas sektor publik dapat dikategorikan menjadi dua:
  - Pemerintahan
  - Non pemerintahan – organisasi nonlaba
- Organisasi publik non pemerintah berbentuk:
  - Organisasi kemasyarakatan – partai politik, organisasi profesi, perkumpulan
  - Yayasan: Yayasan keagamaan, Yayasan Pendidikan, Yayasan Sosial
  - organisasi non pemerintah lainnya
  - organisasi internasional, PBB, ASEAN, WWF
- Aktivitas kegiatan entitas publik dapat sama dengan aktivitas organisasi privat yang berorientasi laba misal rumah sakit, sekolah, menghasilkan produk dan jasa lainnya.
- Keunikan dari entitas sektor publik terletak pada:
  - Tujuan tidak menghasilkan laba atau memupuk kekayaan pemilik
  - Kepemilikan tidak terbagi atas saham
  - Pada beberapa organisasi pendapatan berasal dari kontribusi, sumbangan tidak terkait dengan pemberian barang dan jasa (**pendapatan non pertukaran**)

# PERAN SEKTOR PUBLIK

- Berperan utama dalam politik, sosial dan ekonomi, karena pemerintah berperan sebagai regulator
- Manajemen keuangan dan manajemen keuangan publik memegang peranan penting, karena dalam organisasi tersebut terdapat penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan atau peran entitas tersebut mengalokasikan sumber daya.
- Aspek keuangannya lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan swasta karena keuangan harus mengikuti ketentuan regulasi yang lebih banyak.
- Akuntansi Sektor Publik menjadi bagian dalam mata ujian CPA atau CPMA, mata ujiannya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- Dalam beberapa tahun terakhir peran sektor publik non pemerintah dalam ikut berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat semakin tinggi: Yayasan Agama, Yayasan Sosial, Yayasan Pendidikan dan Organisasi Kemasyarakatan.

# Pengertian dan Ciri Sektor Publik

## Pengertian

- Pengertian Sektor Publik sangat luas, masing-masing disiplin ilmu mempunyai definisi sendiri.
- Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik sering didefinisikan sebagai “suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik

## Ciri

- Tidak mencari keuntungan financial
- Dimiliki oleh publik
- Kepemilikan sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham
- Keputusan berdasarkan konsensus bersama

# KESAMAAN SEKTOR PUBLIK DAN BISNIS

- Bagian integral dalam perekonomian
- Memperoleh aset untuk menghasilkan barang atau jasa
- Terdapat proses manajemen keuangan dalam pengelolaan entitas.
- Diperlukan sistem informasi
- Dalam pengelolaan entitas diperlukan analisis biaya, pengendalian biaya dan Teknik evaluasi.
- Beberapa organisasi non laba yang kegiatannya sama, seperti:
  - Transportasi
  - Pengelolaan utilitas seperti air, listrik
  - Rumah sakit
  - pendidikan
- Memerlukan akuntansi seperti halnya pada entitas bisnis

# PERBEDAAN SEKTOR PUBLIK DAN BISNIS

PERBEDAAN	Entitas Sektor Publik	Entitas Bisnis
<b>Tujuan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tujuan untuk memberikan jasa dari sumber daya yang diperoleh</li> <li>Evaluasi didasarkan pada pencapaian <b>tujuan pelayanan atau tujuan lain</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orientasi pada laba, fokus pada net income atau laba per saham dan kekayaan pemegang saham</li> <li>Alokasi sumber daya didasarkan pada tujuan laba dan memperhatikan ketentuan yang berlaku</li> <li>Evaluasi didasarkan pada pencapaian laba</li> </ul>
<b>Sumber pendapatan dan sumber daya keuangan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendapatan berasal dari pemberi donor</li> <li>Untuk pemerintah pendapatan berasal dari pajak (pendapatan dari transaksi non pertukaran)</li> <li>Sumber pendanaan lain dapat dari utang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendapatan diperoleh dari kegiatan bisnis yang dilakukan</li> <li>Sumber dana lain berasal dari kontribusi pemilik dan utang</li> </ul>
<b>Regulasi dan Pengendalian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk Pemerintah, seluruh aktivitas dan pengendalian didasarkan pada regulasi.</li> <li>Serta alokasi sumber daya berdasarkan anggaran yang formal yang memerlukan persetujuan legislatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian perusahaan berdasarkan pada tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik</li> <li>Regulasi dan ketentuan pemerintah yang relevan tetap harus dipenuhi</li> </ul>
<b>Model Laporan Keuangan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fokus laporan keuangan pada <b>pertanggungjawaban / akuntabilitas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan anggaran</li> <li>Sumber dan penggunaan sumber daya</li> <li>Modal kerja dan arus kas mendukung tujuan pelayanan</li> </ul> </li> <li>Informasi internal dan eksternal relative sama, transparansi menjadikan proses internal diketahui publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tujuan laporan keuangan untuk memberikan informasi kepada kreditor dan investor untuk membuat keputusan (investasi / pemberian kredit)</li> <li>Tujuan informasi untuk valuasi bisnis dan penentuan risiko</li> <li>Terdapat perbedaan informasi internal dan eksternal</li> </ul>
<b>Kepemilikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada kepemilikan atau pemilik yang dapat diidentifikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemilik adalah pemegang saham</li> </ul>
<b>Expense</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Expense untuk penyelenggaraan kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Expense untuk memperoleh pendapatan</li> </ul>

# PERBEDAAN SEKTOR PUBLIK DAN BISNIS LAINNYA

- Pengguna jasa (pelanggan) sektor publik menerima manfaat tanpa membayar atau membayar tapi tidak sebanding dengan jasa yang diberikan: kesehatan, pendidikan
- Memberikan jasa yang sifatnya monopoli dan tidak ada pasarnya misal polisi, pemadam kebakaran
- Bisnis dapat menghentikan jasa atau produk yang merugi. Inovasi produk dilakukan didasarkan pertimbangan laba
- Sektor Publik menjalankan kegiatannya karena keharusan regulasi dan tidak memperhatikan profit yang dihasilkan.
- Evaluasi sektor publik sulit dilaksanakan karena jasa yang diberikan bersifat spesifik dan tidak memiliki nilai pasar.
- Tidak terdapat hubungan langsung antara penerima pelayanan dan pembayar pajak (kontributor dana)

# Karakteristik nonlaba

**Tujuan** entitas nonlaba – bukan laba pencapaian program

## **Karakteristik unik**

- pengguna LK entitas
- tidak ada kepemilikan, kontribusi

Prioritas tujuan pelaporan keuangan (akuntabilitas vs. *decision usefulness*)

**Standar akuntansi yang berbeda dan Kerangka konseptual akuntansi yang berbeda - IPSAS**

# Akuntabilitas dan Transparansi – Entitas Publik

- *Stakeholder* dan masyarakat memerlukan informasi atas entitas publik untuk mengetahui bagaimana pengelola melaksanakan tugasnya dalam mencapai tujuan organisasi dan bagaimana sumber daya yang diberikan dikelola.
- **Akuntabilitas** keuangan entitas sektor publik penting karena sektor publik sebagian besar memperoleh pendanaan dari masyarakat dalam bentuk sumbangan dana atau kontribusi pajak untuk entitas pemerintah.
- Organisasi sektor publik memiliki tujuan berbeda dibandingkan dengan organisasi privat sehingga pengguna laporan keuangan memerlukan informasi yang berbeda.
  - Entitas publik dalam menyusun informasi keuangan membutuhkan standar sehingga terjadi kontrak kesepakatan antara penyusun, pemakai, pemeriksa dalam menyusun dan memahami informasi tersebut.
- Tujuan dari entitas publik, besarnya akuntabilitas, ukuran, sumber daya yang dikelola akan banyak mempengaruhi informasi apa yang disajikan dan standar apa yang akan digunakan untuk menyusun informasi tersebut.

# CONTOH ORGANISASI SEKTOR PUBLIK



# INSTANSI PEMERINTAHAN

- Instansi Pemerintah meliputi:
  - Instansi pemerintah pusat
  - Instansi pemerintah daerah
  - BLU dikonsolidasikan dengan LKP – menggunakan PSAP
  - UBL – Unit Badan Lainnya – menggunakan SAK, disajikan dengan metode ekuitas
  - Badan Umum Milik Negara / Daerah – menggunakan SAK, disajikan dengan metode ekuitas
- Untuk Keuangan Negara pada ketentuan
  - UU 17/2003: Keuangan Negara
  - UU 1/2004: Perbendaharaan Negara
  - UU 15/2004: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Pemerintah Daerah - UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan UU 32/2004
- Pemerintah Desa - UU 6/2014 tentang Desa
- Instansi Pemerintah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan, PP 24 tahun 2005 → PP 71 tahun 2010, yang disusun oleh Komite Akuntansi Pemerintahan kemudian ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

# Organisasi Keagamaan

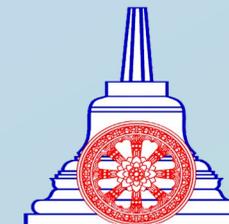
- UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Perlakuan akuntansinya menggunakan pelaporan entitas bertujuan non laba (PSAK 45 digantikan ISAK 35)
- Untuk beberapa lembaga kecil belum menggunakan akuntansi



Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)



Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI)



Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia (Magabudhi)

# Perguruan Tinggi

- UU No 12/2012 tentang Universitas
  - Pasal (2) **“Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.”**
  - **“Prinsip akuntabilitas”** adalah kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan Perguruan Tinggi kepada semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Akuntabilitas Perguruan Tinggi merupakan bentuk pertanggungjawaban Perguruan Tinggi kepada Masyarakat yang terdiri atas:
  - akuntabilitas akademik; dan
  - akuntabilitas nonakademik.
- Perguruan Tinggi
  - Perguruan Tinggi Negeri – (Badan Hukum, Badan Layanan Umum (BLU), Satuan Kerja (Satker))
  - Perguruan Tinggi Swasta

# YAYASAN

- UU No 28/2004 menggantikan UU No. 16 th 2001 tentang Yayasan
- Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota
- Yayasan yang:
  - memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam 1 (satu) tahun buku; atau
  - mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.
  - Laporan keuangan Yayasan wajib diaudit oleh Akuntan Publik dan wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia

# Organisasi Kemasyarakatan

- Peppu No 2/2017 sebagai perubahan atas UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi/ lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri serta **bergerak di bidang kegiatan tertentu** yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya **meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat**, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.
- Contoh: LSM yang bersumber dari sumbangan masyarakat, APBN/APBD; lembaga donor lokal (Tanoto Foundation) ; lembaga donor international (Ford Foundation, UN, World Bank)

# Partai Politik

- UU No. 2/2011 menggantikan UU 2/2009 tentang Partai politik
- Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- Partai Politik berfungsi sebagai sarana Pendidikan Politik bagi anggota dan masyarakat luas; Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa; Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat; Partisipasi politik warga Negara Indonesia ; dan Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik.
- Keuangan Partai Politik bersumber dari:
  - iuran anggota;
  - sumbangan yang sah menurut hukum; dan
  - bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Sumbangan berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- Bantuan keuangan dari APBN/D diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

# Rumah Sakit

- Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat ( UU no 44 tahun 2009 pasal 1)
- Fungsi rumah sakit(pasal 5 UU no 44 tahun 2009)
  - Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan
  - Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan
  - Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM dalam rangka peningkatan kemampuan pemberian layanan kesehatan
  - Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang Kesehatan
- Rumah Sakit BLU menggunakan PSAP, sebelumnya menggunakan PSAP dan SAK
- Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi BLU- Rumah Sakit – belum diupdate dengan ketentuan PSAK baru dan acuannya masih PSAK lama
- Rumah sakit bukan milik pemerintah
  - Swasta murni menggunakan PSAK
  - Swasta beorientasi non laba – SAK Entitas Non Laba



**STANDAR  
AKUNTANSI  
ENTITAS SEKTOR  
PUBLIK**

# Standar Akuntansi Sektor Publik

## Organisasi Sektor Publik di Indonesia

Organisasi pemerintah atau organisasi sektor publik yang dikonsolidasikan dengan LK Pemerintah Rumah Sakit BLU, PTN BLU → menggunakan PSAP

Entitas Berorientasi non laba swasta menggunakan PSAK atau SAK ETAP dan memperhatikan ketentuan penyajian laporan keuangan sesuai ISAK 35

**IPSAS**

*International  
Public Sector  
Accounting  
Standard*

- Digunakan untuk organisasi sektor publik termasuk pemerintah.
- IPSAS disusun berdasarkan IFRS dengan disesuaikan organisasi sektor publik
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) menjadikan IPSAS sebagai referensi utama dalam penyusunan standar.

# Standar Akuntansi Indonesia

- **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan – PSAK → berbasis IFRS**
- **Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik signifikan - SAK-ETAP – Exposure Draft SAK Entitas Privat**
- **Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil Menengah - SAK EMKM**

## **Standar Akuntansi Syariah**

- Mengatur transaksi Syariah
- Pelaporan organisasi Syariah
- Diterapkan bersamaan dengan PSAK / SAK ETAP / EMKM tergantung entitasnya.

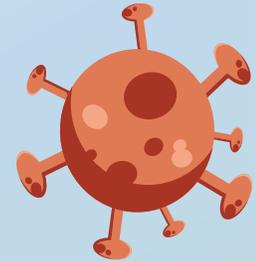
## **Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi nonlaba ISAK 35 (PPSAK 13 – PSAK 45 Dicabut)**

- Nama laporan dapat berbeda
- Akun dalam laporan keuangan dapat berbeda
- Memperhatikan ketentuan PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan

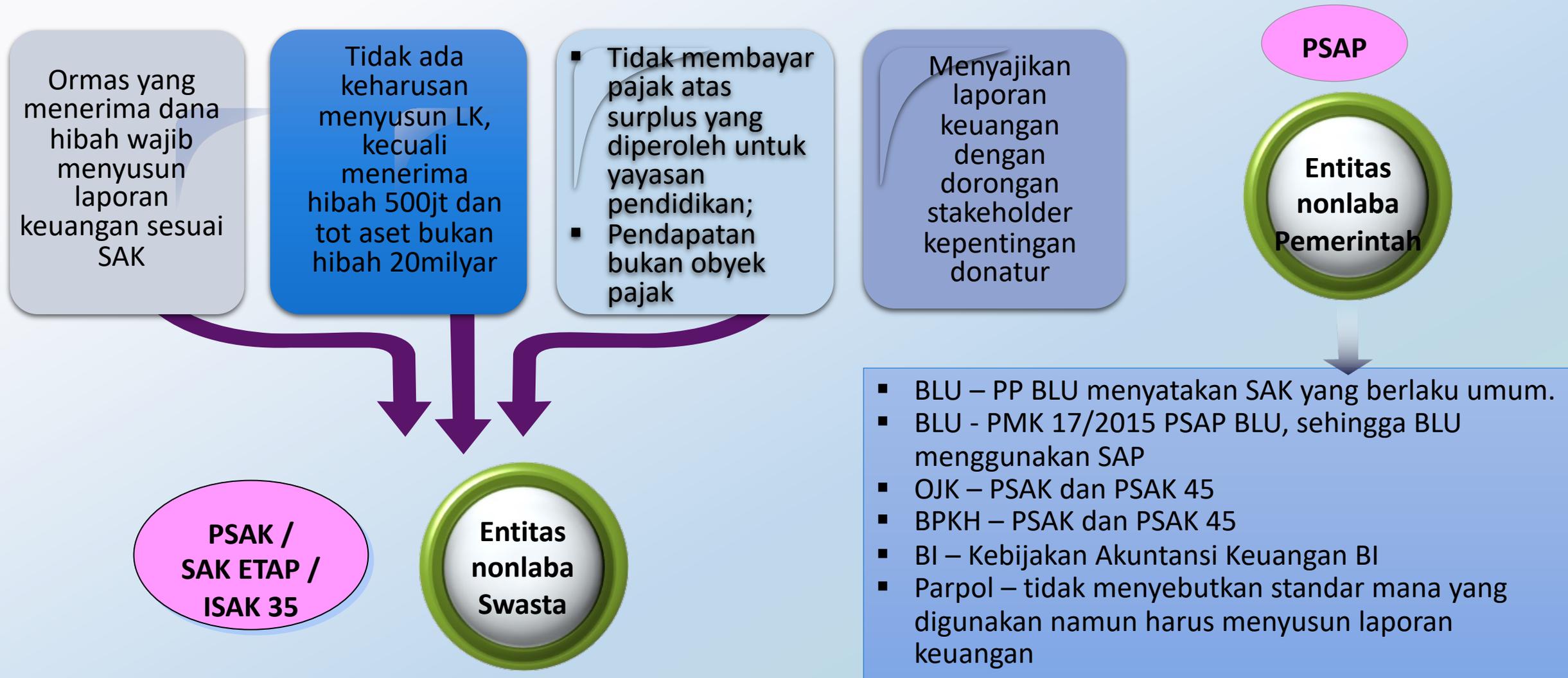
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), PP 71 tahun 2010, digunakan untuk entitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menyusun laporan keuangan. Standar berbasis Akrua, dengan referensi utama IPSAS / *International Public Sector Accounting Standards*.

# DE STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS PRIVAT

- SAK Entitas Privat menggantikan SAK tier 2 SAK ETAP
- SAK Entitas Privat
  - Adopsi dari IFRS for SME's (2015)
  - Lebih sederhana dari SAK lebih komprehensif dari SAK ETAP
- Penambahan pengaturan SAK ETAP dalam SAK Entitas Privat
  - Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Keuangan Tersendiri
  - Instrumen Keuangan Dasar
  - Isu terkait Instrumen Keuangan Lain
  - Kombinasi Bisnis dan Goodwill
  - Hibah Pemerintah
  - Pembayaran Berbasis Saham
  - Penurunan nilai Aset
  - Hiperinflasi
  - Aktivitas Khusus: Agrikultur, Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral; Perjanjian Konsesi Jasa
  - Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi – Penerapan Dini 1/1/2022 dan Efektif 1 Januari 2025

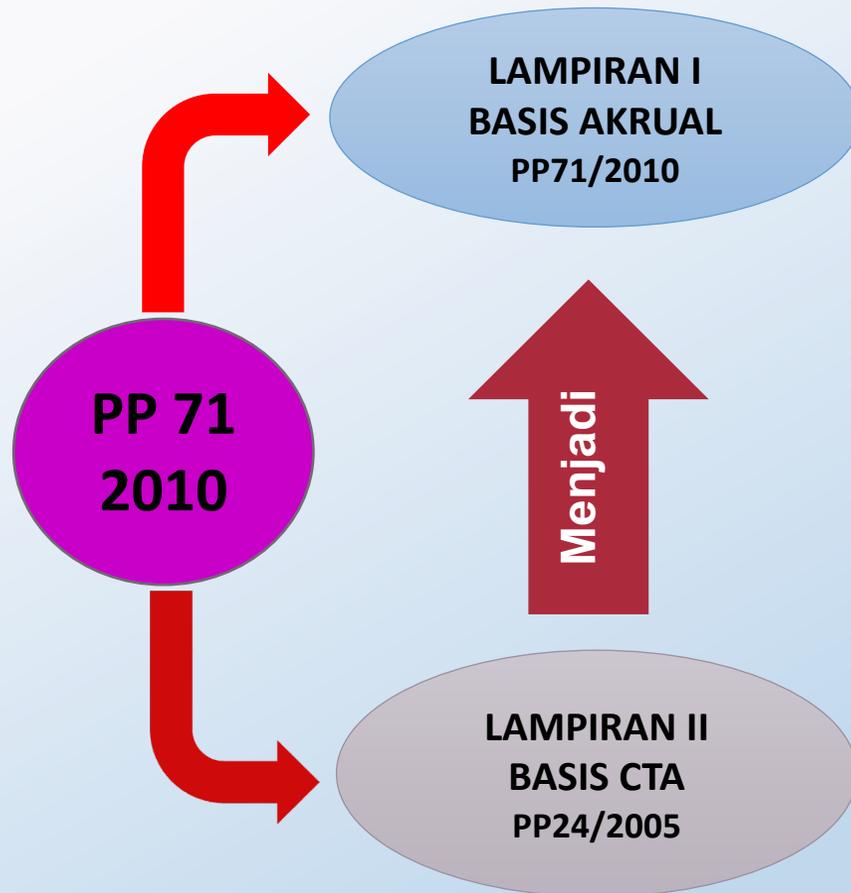


## Praktik Akuntabilitas Organisasi nonlaba di Indonesia



# PENGATURAN PP 71 / 2010

## STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN



- SAP Berbasis AkruaI → Lampiran I
- Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan
- Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 12 PSAP
- Berlaku paling lambat TA 2015

- SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI → Lampiran II (PP 24/2005)
- Berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP
- Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 11 PSAP
- Tidak berlaku mulai TA 2015

# Laporan Keuangan Pemerintahan

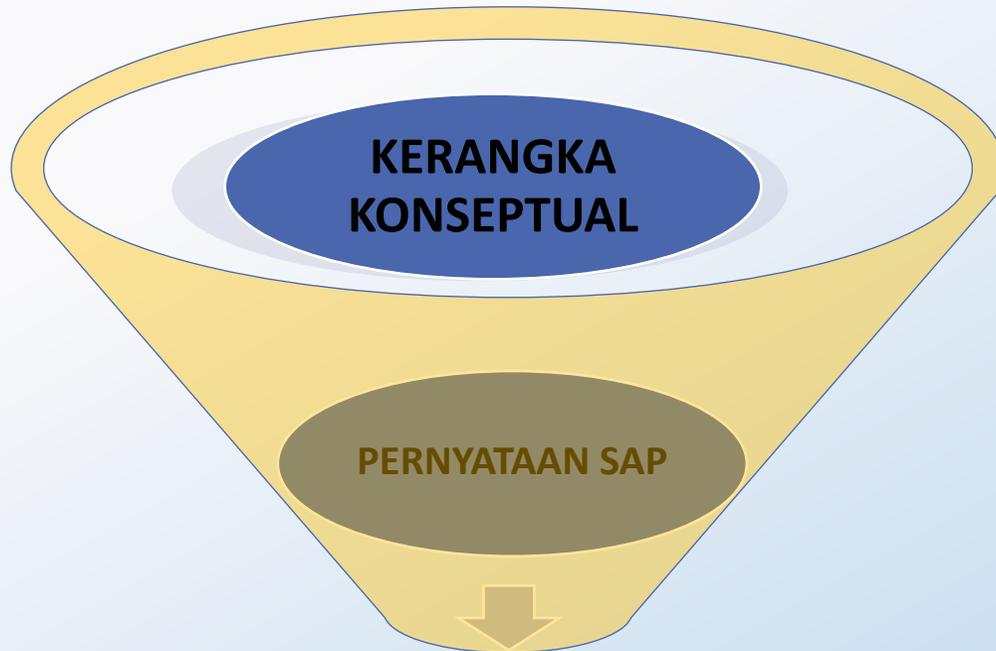
## Laporan Keuangan menurut SAP Akrual

- Laporan Operasional
- Neraca
- Perubahan Ekuitas
- Laporan Arus Kas
- Catatan atas Laporan Keuangan
- Laporan Realisasi Anggaran
- Laporan Perubahan SAL

## Laporan Desa – Draft PSAP Desa

- Laporan Realisasi Anggaran Desa
- Neraca Desa
- Catatan atas Laporan Keuangan Desa

# STRUKTUR STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN



**STANDAR  
AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN**

**Disertai Publikasi Lainnya**

**Interpretasi PSAP (IPSAP)**

- IPSAP dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir pengguna PSAP.

**Buletin Teknis**

- Buletin Teknis merupakan arahan/ pedoman untuk penerapan PSAP maupun IPSAP.

**Surat KSAP – Jawaban atas permasalahan dalam praktik**

# Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

	PSAP
	Kerangka Konseptual
PSAP 01	Penyajian Laporan Keuangan
PSAP 02	Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
PSAP 03	Laporan Arus Kas
PSAP 04	Catatan atas Laporan Keuangan
PSAP 05	Akuntansi Persediaan
PSAP 06	Akuntansi Investasi
PSAP 07	Akuntansi Aset Tetap
PSAP 08	Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
PSAP 09	Akuntansi Kewajiban
PSAP 10	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi & Operasi yang Tidak Dilanjutkan
PSAP 11	Laporan Keuangan Konsolidasian
PSAP 12	Laporan Operasional
PSAP 13	Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum PMK 217/2015
PSAP 06	Akuntansi Investasi (Revisi 2016) – PMK 223/2016
PSAP 14	Aset Tak Berwujud - PMK 90/2019

## Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

	Interpretasi PSAP
Interpretasi No 1	Transaksi Mata Uang Asing
Interpretasi No 2	Pengakuan Pendapatan pada Bendahara Umum Negara/Daerah
Interpretasi No 3	Pengakuan Belanja pada Bendahara Umum Negara/Daerah
Interpretasi No 4	Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan

## Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan

No	Bultek	Tahun	Keterangan
01	Bultek 15 Akuntansi Aset Tetap	2014	Mengganti Bultek 09
02	Bultek 16 Akuntansi Piutang	2014	Mengganti Bultek 16
03	Bultek 17 Akuntansi Aset tak Berwujud	2014	Mengganti Bultek 11
04	Bultek 18 Akuntansi Penyusutan	2014	Mengganti Bultek 05
05	Bultek 19 Akuntansi Belanja Bantuan Sosial	2015	Mengganti Bultek 10
06	Bultek 20 Akuntansi Kerugian Negara	2015	Bultek Baru
07	Bultek 21 Akuntansi Transfer	2015	Bultek Baru
08	Bultek 22 Akuntansi Utang	2015	Bultek Baru
09	Bultek 23 Akuntansi Pendapatan non Perpajakan	2016	Bultek Baru (berlaku 2017)
10	Bultek 24 Akuntansi Pendapatan Perpajakan	2016	Bultek Baru (berlaku 2017)

# RENCANA PENGEMBANGAN PSAP 2020-2025

## PSAP 2020

1. PP 71 tahun 2010 (12 PSAP)
2. BLU
3. R Investasi
4. Aset tak Berwujud
5. R Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi dan Kesalahan
6. Peristiwa setelah tanggal Pelaporan
7. Perjanjian Konsesi Jasa
8. Properti Investasi
9. Provisi, Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi
10. Pengaturan Bersama
11. Agrikultur
12. Imbalan Kerja
13. Instrumen Keuangan: Penyajian
14. Instrumen Keuangan: Pengakuan & Pengukuran
15. Instrumen Keuangan: Pengungkapan

## PSAP 2021

1. Kurs Valuta Asing
2. Pihak Berelasi
3. Penurunan Nilai Unit Penghasil Kas
4. Penurunan Nilai Unit Bukan Penghasil Kas
5. Investasi pada Entitas Asosiasi
6. Segmen
7. Bantuan Sosial (Social Benefits)
8. Biaya Bunga
9. Pendapatan dengan Kewajiban Pelaksanaan
10. Pendapatan tanpa Kewajiban Pelaksanaan
11. Sewa
12. Analisis Laporan Keuangan
13. Penyajian Informasi Sektor Pemerintah Umum

## PSAP 2022

1. R Kerangka Konseptual
2. R Penyajian Laporan Keuangan
3. R Laporan Arus kas
4. R CALKc
5. R LRA
6. R Laporan Operasional
7. R BLU
8. R Laporan Konsolidasi
9. R Investasi
10. R Persediaan
11. R Aset Tetap
12. R Aset tak Berwujud

## PSAP 2023

1. Penyusunan Modul Sosialisasi

2025

## PSAP 2025

**IMPLEMENTASI**

## PSAP 2024

**SOSIALISASI**



**ISAK 35  
PENYAJIAN LAPORAN  
KEUANGAN ENTITAS  
BERORIENTASI  
NONLABA**

# Pendahuluan

## ☐ Referensi

- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan

## ☐ Latar Belakang

- PSAK 1 – menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorientasi laba. Jika entitas dengan aktivitas non laba menerapkan PSAK 1 maka perlu menyesuaikan deskripsi.
- Ruang lingkup PSAK 1 secara substansi telah mencakup ruang lingkup penyajian LK entitas dengan aktivitas nonlaba.
- PSAK 1 tidak menyediakan pedoman penyajian LK entitas berorientasi non laba
- Entitas berorientasi non laba berbeda dalam:
  - Cara memperoleh sumber daya tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik tidak sebandingkan dengan sumber daya yang diberikan.

# Pendahuluan

## □ Ruang Lingkup

- Berlaku untuk entitas berorientasi nonlaba terlepas bentuk badan hukumnya.
- **Juga berlaku untuk ETAP.**
- Diterapkan khusus untuk penyajian laporan keuangan

## □ Permasalahan

- Interpretasi ini membahas bagaimana entitas berorientasi non laba membuat penyesuaian:
  - Deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos dalam laporan keuangan dan;
  - Deskripsi yang digunakan dalam laporan keuangan itu sendiri

# Interpretasi

- Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba disusun dengan memperhatikan persyaratan, struktur laporan dan persyaratan minimal yang diatur dalam PSAK 1. (par 09)
- Entitas berorientasi non laba dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos dalam laporan keuangan. Misal: pembatasan sumber daya (par 10)
- Entitas berorientasi non laba dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan atas laporan keuangan. Misal Judul laporan perubahan aset neto untuk mencerminkan fungsi yang lebih sesuai dengan isi laporan keuangan. (par 11)
- Entitas berorientasi nonlaba tetap mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan dalam menyajikan laporan keuangan termasuk catatan atas LK, sehingga tidak mempengaruhi kualitas informasi yang disajikan dalam LK.

# Tanggal Efektif

- Untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020

# Dasar Kesimpulan

## Dasar Kesimpulan melengkapi namun bukan bagian dari ISAK 35

- Dalam satu standar dengan tier yang sama mengatur penyajian laporan keuangan yang berbeda menunjukkan inkonsistensi pengaturan (PSAK 1 dan PSAK 45). Ruang lingkup PSAK 1 dipahami seolah-olah hanya berlaku untuk entitas berorientasi laba.
- PSAK 1 menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorientasi laba termasuk entitas bisnis sektor public. Jika entitas berorientasi non laba, dapat menyesuaikan deskripsi beberapa pos. Ruang lingkup PSAK 1 secara substansi mencakup ruang lingkup penyajian LK dengan aktivitas non laba.
- EBNL dan EBL berbeda dalam memperoleh sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang seimbang. Konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan untuk hal yang serupa lebih tepat merujuk pada pengaturan yang sudah ada dalam SAK dan SAK ETAP.

# Dasar Kesimpulan

## Ruang Lingkup dan Permasalahan

- ISAK 35 memberikan pedoman penyajian laporan keuangan pada EBNL
- Berlaku juga untuk SAK ETAP
- Tidak memberikan definisi atau kriteria untuk membedakan EBNL dan EBL.
- Entitas melakukan penilaian sendiri untuk menentukan apakah EBL atau EBNL. Beberapa faktor yang dipertimbangkan:
  - Apakah sumber daya yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
  - Menghasilkan barang/jasa tanpa tujuan memupuk laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik
  - Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada EBL. Kepemilikan tidak dapat dijual, dialihkan, ditebus atau kepemilikan tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya pada likuidasi

# Dasar Kesimpulan

## Interpretasi

- IAS 1 par 5 mengizinkan EBNL menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam LK dan LK sendiri. PSAK 1 tidak memberikan penjelasan dan contoh lebih penyesuaian tersebut.
- Interpretasi dilengkapi contoh ilustrasi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto dan Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Contoh dalam interpretasi tidak ditujukan untuk mengilustrasikan seluruh aspek dari SAK atau mencakup bentuk yang sesuai untuk EBNL. Contoh dapat berbeda dari kondisi yang terdapat pada EBNL.

# Contoh Ilustrasi

- Laporan Posisi Keuangan
  - Menyajikan pos penghasilan komprehensif pada bagian aset neto tanpa pembatasan
  - Menyajikan pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri
- Laporan Penghasilan Komprehensif
  - Kolom tunggal
  - Menyajikan informasi sesuai dengan klasifikasi aset neto
- Laporan Perubahan Aset Neto
- Laporan Arus kas
- Catatan atas Laporan Keuangan

## Laporan Posisi Keuangan

<b>ENTITAS XYZ</b>		
<b>Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 20X2</b>		
<i>(dalam jutaan rupiah)</i>		
	20X2	20X1
<b>ASET</b>		
<i>Aset Lancar</i>		
Kas dan setara kas	XXXX	XXXX
Piutang bunga	XXXX	XXXX
Investasi jangka pendek	XXXX	XXXX
Aset lancar lain	XXXX	XXXX
<i>Total Aset Lancar</i>	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<i>Aset Tidak Lancar</i>		
Properti investasi	XXXX	XXXX
Investasi jangka panjang	XXXX	XXXX
Aset tetap	XXXX	XXXX
<i>Total Aset Tidak Lancar</i>	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<b>TOTAL ASET</b>	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<b>LIABILITAS</b>		
<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>		
Pendapatan diterima di muka	XXXX	XXXX
Utang jangka pendek	XXXX	XXXX
<i>Total Liabilitas Jangka Pendek</i>	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>		
Utang jangka panjang	XXXX	XXXX
Liabilitas imbalan kerja	XXXX	XXXX
<i>Total Liabilitas Jangka Panjang</i>	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<b>Total Liabilitas</b>	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<b>ASET NETO</b>		
<i>Tanpa pembatasan (without restrictions) dari pemberi sumber daya</i>		
Surplus akumulasian	XXXX	XXXX
Penghasilan komprehensif lain*)	XXXX	XXXX
<i>Dengan pembatasan (with restrictions) dari pemberi sumber daya (catatan B)</i>		
<b>Total Aset Neto</b>	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO</b>	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>

## Laporan Posisi Keuangan

**ENTITAS XYZ**  
**Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 20X2**  
*(dalam jutaan rupiah)*

	20X2	20X1
<b>ASET</b>		
<i>Aset Lancar</i>		
Kas dan setara kas	XXXX	XXXX
Piutang bunga	XXXX	XXXX
Investasi jangka pendek	XXXX	XXXX
Aset lancar lain	XXXX	XXXX
<i>Total Aset Lancar</i>	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<i>Aset Tidak Lancar</i>		
Properti investasi	XXXX	XXXX
Investasi jangka panjang	XXXX	XXXX
Aset tetap	XXXX	XXXX
<i>Total Aset Tidak Lancar</i>	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<b>TOTAL ASET</b>	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<b>LIABILITAS</b>		
<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>		
Pendapatan diterima di muka	XXXX	XXXX
Utang jangka pendek	XXXX	XXXX
<i>Total Liabilitas Jangka Pendek</i>	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>		
Utang jangka panjang	XXXX	XXXX
Liabilitas imbalan kerja	XXXX	XXXX
<i>Total Liabilitas Jangka Panjang</i>	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<b>Total Liabilitas</b>	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<b>ASET NETO</b>		
<i>Tanpa pembatasan (without restrictions) dari pemberi sumber daya**)</i>	XXXX	XXXX
<i>Dengan pembatasan (with restrictions) dari pemberi sumber daya (catatan B)</i>	XXXX	XXXX
<b>Total Aset Neto</b>	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO</b>	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>

Laporan  
Penghasilan  
Komprehensif

ENTITAS XYZ  
Laporan Penghasilan Komprehensif  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2  
(dalam jutaan rupiah)

	20X2	20X1
<b>TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA</b>		
<i>Pendapatan</i>		
Sumbangan	XXXX	XXXX
Jasa layanan	XXXX	XXXX
Penghasilan investasi jangka pendek (catatan D)	XXXX	XXXX
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	XXXX	XXXX
Lain-lain	XXXX	XXXX
<b>Total Pendapatan</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<i>Beban</i>		
Gaji, upah	XXXX	XXXX
Jasa dan profesional	XXXX	XXXX
Administratif	XXXX	XXXX
Depresiasi	XXXX	XXXX
Bunga	XXXX	XXXX
Lain-lain	XXXX	XXXX
<b>Total Beban (catatan E)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Kerugian akibat kebakaran	XXXX	XXXX
<b>Total Beban</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA</b>		
<i>Pendapatan</i>		
Sumbangan	XXXX	XXXX
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	XXXX	XXXX
<b>Total Pendapatan</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<i>Beban</i>		
Kerugian akibat kebakaran	XXXX	XXXX
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

## Laporan Penghasilan Komprehensif

**ENTITAS XYZ**  
**Laporan Penghasilan Komprehensif**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2**  
*(dalam jutaan rupiah)*

	20X2			20X1		
	Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Jumlah	Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Jumlah
<b>PENDAPATAN</b>						
Sumbangan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Jasa layanan	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
Penghasilan investasi jangka pendek (catatan D)	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Lain-lain	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
<b>Total Pendapatan</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>BEBAN</b>						
Gaji, upah	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
Jasa dan profesional	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
Administratif	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
Depresiasi	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
Bunga	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
Lain-lain	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
<b>Total Beban (catatan E)</b>	<b>xxxx</b>	<b>-</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>-</b>	<b>xxxx</b>
Kerugian akibat kebakaran	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
<b>Total Beban</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>						
	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>

## Laporan Perubahan Aset Neto

<b>ENTITAS XYZ</b>		
<b>Laporan Perubahan Aset Neto</b>		
<b>untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2</b>		
<i>(dalam jutaan rupiah)</i>		
	20X2	20X1
<b>ASET NETO TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA</b>		
Saldo awal	XXXX	XXXX
<i>Surplus tahun berjalan</i>	XXXX	XXXX
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan C)	XXXX	XXXX
<b>Saldo akhir</b>	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
 <i>Penghasilan Komprehensif Lain</i>		
Saldo awal	XXXX	XXXX
Peghasilan komprehensif tahun berjalan <sup>***</sup> )	XXXX	XXXX
<b>Saldo akhir</b>	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<b>Total</b>	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
 <b>ASET NETO DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA</b>		
Saldo awal	XXXX	XXXX
Surplus tahun berjalan	XXXX	XXXX
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan C)	(XXXX)	(XXXX)
<b>Saldo akhir</b>	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
 <b>TOTAL ASET NETO</b>	 <u>XXXX</u>	 <u>XXXX</u>

## Laporan Arus Kas

**ENTITAS XYZ**  
**Laporan Arus Kas**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2**  
*(dalam jutaan rupiah)*

	20X2	20X1
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>		
Kas dari sumbangan	XXXX	XXXX
Kas dari pendapatan jasa	XXXX	XXXX
Bunga yang diterima	XXXX	XXXX
Penerimaan lain-lain	XXXX	XXXX
Bunga yang dibayarkan	XXXX	XXXX
Kas yang dibayarkan kepada karyawan	XXXX	XXXX
<i>Kas neto dari aktivitas operasi</i>	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<b>AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Ganti rugi dari asuransi kebakaran	XXXX	XXXX
Pembelian peralatan	(XXXX)	(XXXX)
Penerimaan dari penjualan investasi	XXXX	XXXX
Pembelian investasi	(XXXX)	(XXXX)
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi</i>	<u>(XXXX)</u>	<u>(XXXX)</u>
<b>AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
<i>Penerimaan dari sumbangan yang dibatasi untuk:</i>		
Investasi dalam dana abadi ( <i>endowment</i> )	XXXX	XXXX
Investasi bangunan	XXXX	XXXX
	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<i>Aktivitas pendanaan lain:</i>		
Bunga dibatasi untuk reinvestasi	XXXX	XXXX
Pembayaran liabilitas jangka panjang	(XXXX)	(XXXX)
	<u>(XXXX)</u>	<u>(XXXX)</u>
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan</i>	<u>(XXXX)</u>	<u>(XXXX)</u>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS</b>	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE</b>	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE</b>	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>

## Catatan atas Laporan Keuangan

### *Catatan A*

Entitas menyajikan hibah atau wakaf, berupa kas atau aset lain, sebagai sumbangan dengan pembatasan, jika hibah atau wakaf tersebut diterima dengan persyaratan pembatasan baik untuk penggunaan aset atau atas manfaat ekonomik masa depan yang diperoleh dari aset tersebut. Jika pembatasan dari pemberi sumber daya telah kedaluwarsa, yaitu pada saat masa pembatasan telah berakhir atau pembatasan penggunaan telah dipenuhi, maka aset neto dengan pembatasan digolongkan kembali menjadi aset neto tanpa pembatasan dan disajikan dalam laporan perubahan aset neto sebagai aset neto yang dibebaskan dari pembatasan.

Entitas menyajikan hibah atau wakaf, berupa tanah, bangunan dan peralatan sebagai sumbangan tanpa pembatasan, kecuali jika ada pembatasan yang secara eksplisit menyatakan tujuan pemanfaatan aset atau penggunaan manfaat ekonomik masa depan yang diperoleh dari aset tersebut dari pemberi sumber daya. Hibah atau wakaf untuk aset tetap dengan pembatasan secara eksplisit yang menyatakan tujuan pemanfaatan aset tersebut dan sumbangan berupa kas atau aset lain yang harus digunakan untuk memperoleh aset tetap disajikan sebagai sumbangan dengan pembatasan. Jika tidak ada pembatasan secara eksplisit dari pemberi sumbangan mengenai pembatasan jangka waktu penggunaan aset tetap tersebut, pembebasan pembatasan dilaporkan pada saat aset tetap tersebut dimanfaatkan.

## Catatan atas Laporan Keuangan

### Catatan C

Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan pemberi sumber daya karena terjadinya beban tertentu yang memenuhi tujuan pembatasan atau tercapainya periode waktu atau kejadian lain yang disyaratkan oleh pemberi sumber daya.

Tujuan pembatasan yang dipenuhi:

Beban program A	XXXX
Beban program B	XXXX
Beban program C	XXXX

---

XXXX

---

Peralatan yang dibeli dan digunakan untuk program A

XXXX

---

Pembatasan waktu yang dipenuhi:

Jangka waktu yang telah dipenuhi	XXXX
Kematian pemberi sumber daya tahunan	XXXX

---

XXXX

---

Pembebasan jumlah *endowment* yang disisihkan  
(*appropriated* tanpa pembatasan tujuan

XXXX

Pembebasan jumlah *endowment* yang disisihkan  
(*appropriated*) dengan pembatasan tujuan

XXXX

---

Total pembatasan yang dibebaskan

XXXX

---

**UNIVERSITAS INDONESIA DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN, 31 DESEMBER 2019**  
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Laporan Posisi  
Keuangan - Aset**

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December		1 Januari/ January
		2019	2018 <sup>1)</sup>	2018 <sup>1)</sup>
<b>ASET</b>				
<b>Aset lancar</b>				
Kas dan setara kas	6	1,409,775	1,747,137	2,146,756
Investasi jangka pendek		14,420	3,479	9,394
Piutang usaha dan lain-lain		67,234	47,814	40,604
Biaya dibayar dimuka		15,761	8,898	12,240
Persediaan		23,031	16,743	16,408
Pajak dibayar dimuka lainnya		-	1,179	513
		<u>1,530,221</u>	<u>1,825,250</u>	<u>2,225,915</u>
<b>Aset tidak lancar</b>				
Investasi jangka panjang		29,259	29,198	28,479
Aset tetap	7	3,692,984	2,507,381	2,394,514
Dana abadi	8	61,525	56,701	48,744
Aset lain-lain		<u>15,734</u>	<u>13,706</u>	<u>6,143</u>
		<u>3,799,502</u>	<u>2,606,986</u>	<u>2,477,880</u>
<b>Jumlah aset</b>		<u><u>5,329,723</u></u>	<u><u>4,432,236</u></u>	<u><u>4,703,795</u></u>

Penyajian kembali LK 2018 karena entitas menggunakan PSAK dan mengkonsolidasikan investasi di Anak Perusahaan

**UNIVERSITAS INDONESIA DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN, 31 DESEMBER 2019**  
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Laporan Posisi  
Keuangan –  
Liabilitas dan Aset  
Neto**

<b>LIABILITAS</b>				
<b>Liabilitas jangka pendek</b>				
Utang usaha dan lain-lain	9	126,938	56,979	104,051
Akrual	10	45,399	45,648	42,576
Utang pajak lainnya		12,884	6,488	8,145
Pendapatan diterima dimuka	11	<u>130,097</u>	<u>7,556</u>	<u>18,151</u>
		<u>315,318</u>	<u>116,671</u>	<u>172,923</u>
<b>Liabilitas jangka panjang</b>				
Pendapatan diterima dimuka	11	1,010,243	47,546	35,877
Kewajiban imbalan kerja	12	<u>67,845</u>	<u>81,457</u>	<u>83,432</u>
		<u>1,078,088</u>	<u>129,003</u>	<u>119,309</u>
<b>Jumlah liabilitas</b>		<u>1,393,406</u>	<u>245,674</u>	<u>292,232</u>
<b>ASET NETO</b>				
Aset neto tidak terikat		3,713,167	3,966,122	4,195,481
Aset neto terikat temporer		198,103	196,641	193,664
Aset neto terikat permanen		<u>25,047</u>	<u>23,799</u>	<u>22,418</u>
<b>Jumlah aset neto</b>		<u>3,936,317</u>	<u>4,186,562</u>	<u>4,411,563</u>
<b>Jumlah liabilitas dan aset neto</b>		<u>5,329,723</u>	<u>4,432,236</u>	<u>4,703,795</u>

Penyajian kembali LK 2018 karena entitas menggunakan PSAK dan mengkonsolidasikan investasi di Anak Perusahaan

**UNIVERSITAS INDONESIA DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**  
**LAPORAN AKTIVITAS KONSOLIDASIAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**  
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Perubahan Aset  
Neto Tidak Terikat**

	<u>2019</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2018<sup>(1)</sup></u>
<b>PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT</b>			
<b>Pendapatan</b>			
Operasional	1,750,258	13	1,539,023
BPPTN/APBN <sup>(2)</sup>	523,599	13	513,739
Hibah/sumbangan	251,308	13	131,003
Lain-lain	87,481	13	87,967
	<u>2,612,646</u>		<u>2,271,732</u>
Aset neto terbebaskan dari pembatasannya	<u>689</u>	13	<u>1,231</u>
Jumlah pendapatan	<u>2,613,335</u>		<u>2,272,963</u>
<b>Beban</b>			
Operasi	(2,535,700)	14	(2,301,786)
Penyusutan dan amortisasi	(318,188)	14	(196,306)
Lain-lain	(38,710)	14	(16,978)
Jumlah beban	<u>(2,892,598)</u>		<u>(2,515,070)</u>
<b>Penurunan aset neto tidak terikat</b>	<u>(279,263)</u>		<u>(242,107)</u>

Penyajian kembali LK 2018 karena entitas menggunakan PSAK dan mengkonsolidasikan investasi di Anak Perusahaan

**UNIVERSITAS INDONESIA DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**  
**LAPORAN AKTIVITAS KONSOLIDASIAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**  
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Perubahan Aset  
Neto Terikat  
Temporer**

<b>PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT TEMPORER</b>			
<b>Pendapatan</b>			
Hibah/sumbangan		164	1,013
Lain-lain		<u>1,987</u>	<u>3,195</u>
		2,151	4,208
Aset neto terbebaskan dari pembatasannya		<u>(689)</u>	<u>(1,231)</u>
Jumlah pendapatan		<u>1,462</u>	<u>2,977</u>
<b>Kenaikan aset neto terikat temporer</b>		<u>1,462</u>	<u>2,977</u>

Penyajian kembali LK 2018 karena entitas menggunakan PSAK dan mengkonsolidasikan investasi di Anak Perusahaan

**UNIVERSITAS INDONESIA DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**  
**LAPORAN AKTIVITAS KONSOLIDASIAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**  
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Perubahan Aset  
Neto Terikat  
Permanen dan  
Penghasilan  
Komprensif Lain**

	<u>2019</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2018<sup>1)</sup></u>
<b>PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT PERMANEN</b>			
Pendapatan Lain-lain	1,248		1,381
<b>Kenaikan aset neto terikat permanen</b>	<u>1,248</u>		<u>1,381</u>
<b>Penurunan aset neto sebelum pajak</b>	<u>(276,553)</u>		<u>(237,749)</u>
Beban pajak penghasilan	-	15	-
<b>Penurunan aset neto</b>	<u>(276,553)</u>		<u>(237,749)</u>
<b>Aset neto pada awal tahun</b>	4,186,562		4,411,563
Kenaikan efek tersedia untuk dijual	1,563		657
Pengukuran kembali kewajiban imbalan kerja	24,745	12	12,091
<b>Aset neto awal tahun setelah penyesuaian</b>	<u>4,212,870</u>		<u>4,424,311</u>
<b>Aset neto pada akhir tahun</b>	<u><u>3,936,317</u></u>		<u><u>4,186,562</u></u>

Penyajian kembali LK 2018 karena entitas menggunakan PSAK dan mengkonsolidasikan investasi di Anak Perusahaan

**UNIVERSITAS INDONESIA DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**  
**LAPORAN ARUS KAS**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Arus Kas Operasi**

	<u>2019</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2018<sup>1)</sup></u>
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>			
Penurunan aset neto sebelum pajak Penambahan/(pengurangan) item yang tidak mempengaruhi arus kas operasi:	(276,553)		(237,749)
Provisi penurunan nilai piutang	615		277
Penyusutan	313,102	7,14	194,890
Amortisasi	5,086	14	1,416
Rugi atas penjualan aset tetap	1,460		392
Kewajiban imbalan kerja	14,825	12	13,287
Pendapatan bunga	(76,995)		(71,790)
Pendapatan dana abadi	(10,507)		(14,194)
Aset tetap yang diperoleh melalui hibah atau sumbangan	(1,165,159)	16	(12,676)
Selisih kurs mata uang asing yang belum direalisasi	(4,318)		6,826
	<u>(1,198,444)</u>		<u>(119,321)</u>
<b>Perubahan modal kerja:</b>			
Piutang usaha dan lain-lain	(20,035)		(7,487)
Biaya dibayar dimuka	(6,863)		3,342
Persediaan	(6,288)		(335)
Pajak dibayar dimuka lainnya	1,179		(666)
Aset lain-lain	(7,114)		(8,979)
Utang usaha dan lain-lain	92,123		(54,333)
Akrual	(249)		3,072
Utang pajak lainnya	6,396		(1,657)
Pendapatan diterima dimuka	1,085,238		1,074
Pembayaran kewajiban imbalan kerja	(3,692)	12	(3,171)
Penerimaan dari pendapatan bunga	76,995		71,790
	<u>1,217,690</u>		<u>2,650</u>
<b>Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi</b>	<u>19,246</u>		<u>(116,671)</u>

Penyajian kembali LK 2018 karena entitas menggunakan PSAK dan mengkonsolidasikan investasi di Anak Perusahaan

**UNIVERSITAS INDONESIA DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**  
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Arus Kas Investasi  
dan Pendanaan**

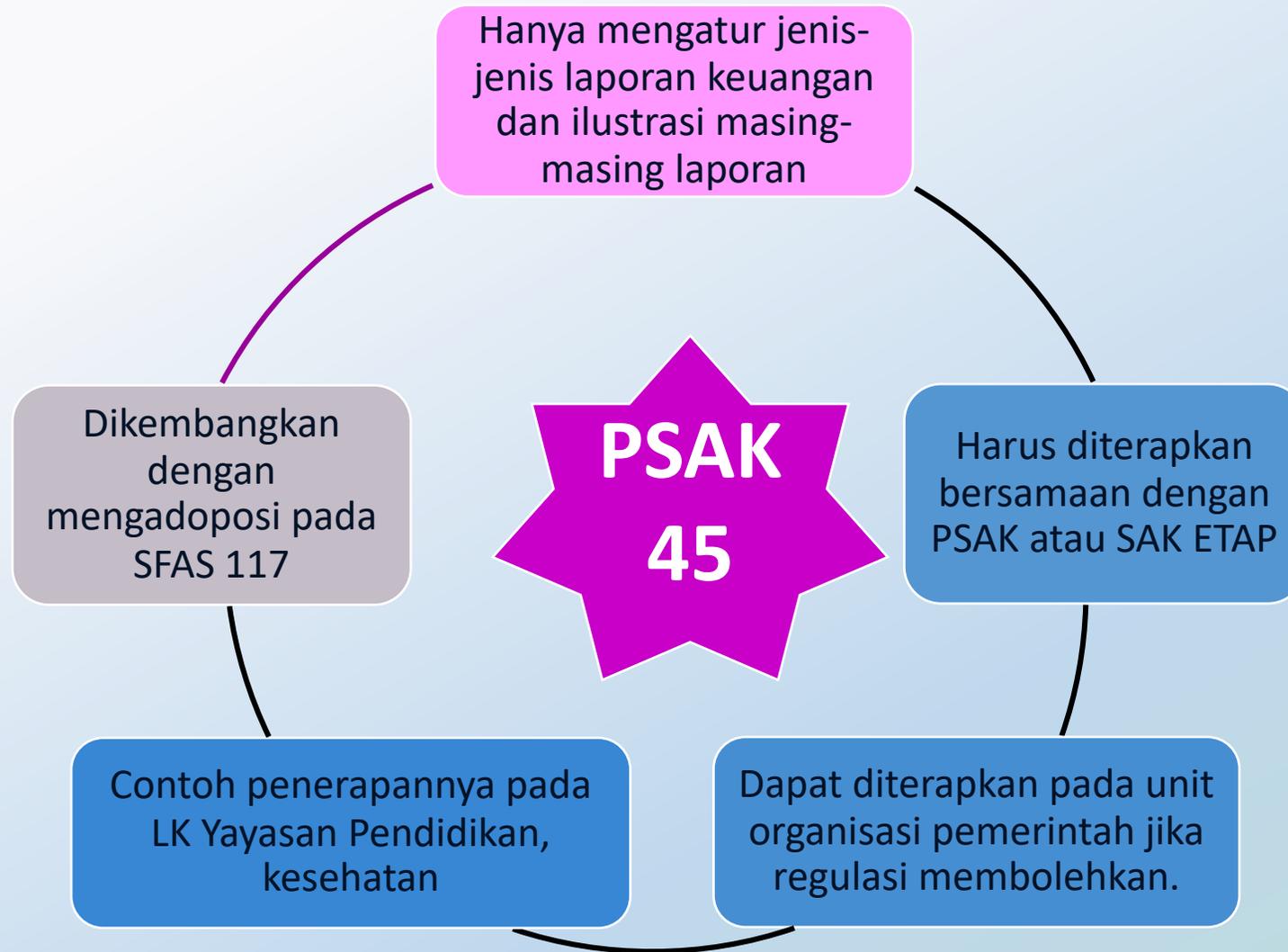
	<u>2019</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2018<sup>1)</sup></u>
<b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>			
Penerimaan atas penjualan investasi jangka pendek	1,659		6,705
Penambahan investasi jangka pendek	(11,037)		(133)
Penerimaan atas penjualan investasi jangka panjang	3,239		2,991
Penambahan investasi jangka panjang	(3,300)		(3,710)
Perolehan aset tetap	(357,170)	7,16	(288,212)
<b>Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<u>(366.609)</u>		<u>(282.359)</u>
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>			
Penerimaan dana abadi	5,683		6,237
<b>Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan</b>	<u>5,683</u>		<u>6,237</u>
<b>Penurunan bersih kas dan setara kas</b>	<u>(341.680)</u>		<u>(392.793)</u>
<b>Kas dan setara kas pada awal tahun</b>	1,747,137	6	2,146,756
<b>Efek perubahan kurs pada kas dan setara kas</b>	4,318		(6,826)
<b>Kas dan setara kas pada akhir tahun</b>	<u>1.409.775</u>	6	<u>1.747.137</u>

Penyajian kembali LK 2018 karena entitas menggunakan PSAK dan mengkonsolidasikan investasi di Anak Perusahaan



# PSAK 45 PELAPORAN KEUANGAN ENTITAS NIRLABA

# Standar Akuntansi Nirlaba PSAK 45



## Penerapan

- PSAK 45 dan PSAK untuk Organisasi nonlaba dengan akuntabilitas publik signifikan
- PSAK 45 dan SAK ETAP untuk Organisasi nonlaba dengan akuntabilitas publiknya tidak signifikan

# PSAK 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nir Laba

- Pernyataan ini menetapkan informasi dasar tertentu yang disajikan dalam laporan keuangan entitas nonlaba.
- Pengaturan yang tidak diatur dalam Pernyataan ini mengacu pada SAK, atau SAK ETAP untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.
- Tujuan:
  - Mengatur pelaporan keuangan entitas nonlaba.
  - Laporan keuangan entitas nonlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi.
- Pengaturan khusus:
  - Komponen dan nama laporan keuangan berbeda
  - Aset netto – diklasifikasikan menjadi:
    - Aset netto tidak terikat
    - Aset netto terikat: permanen atau temporer.

# Laporan Keuangan Entitas Nirlaba

Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode laporan

Laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan

Laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan

Catatan atas laporan keuangan.

# Nir Laba – PSAK 45

- Perbedaan → cara organisasi memperoleh sumber daya
- Organisasi nirlaba → memperoleh sumber daya dari sumbangan anggota dan penyumbang yang tidak mengharapkan imbalan
- Ada organisasi yang mendanai kebutuhan modalnya dari utang dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa.
- Laporan keuangan memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan → menyajikan terpisah aktiva terikat dan tidak terikat.
- Pertanggungjawaban manajer mengenai kemampuannya mengelola sumber daya organisasi yang diterima dari para penyumbang disajikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas.

# Lingkup PSAK 45

- Laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi nirlaba yang memenuhi karakteristik :
  - Sumber daya entitas nirlaba berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
  - Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas nirlaba.
  - Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada entitas bisnis, kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual atau mencerminkan proporsi pembagian sumber daya saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba.

Dapat diterapkan oleh lembaga pemerintah, dan unit-unit sejenis lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# Penerapan PSAK 45

- Pernyataan ini menetapkan informasi dasar tertentu yang disajikan dalam laporan keuangan entitas nirlaba.
- Pengaturan yang tidak diatur dalam Pernyataan ini mengacu pada SAK, atau SAK ETAP untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.

# Definisi

- **Pembatasan permanen** adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.
- **Pembatasan temporer** adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.
- **Sumbangan terikat** adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer.
- **Sumbangan tidak terikat** adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang.

# Dana atau Aset Bersih Entitas Nirlaba

- **Tidak terikat**

Dana dapat digunakan untuk keperluan entitas nirlaba tanpa dibatasi oleh peraturan yang mengikat. Entitas lebih leluasa untuk melakukan pengeluaran bagi jenis kontribusi ini.

- **Terikat sementara**

Kontribusi yang masuk dalam terikat sementara disebabkan oleh tujuan yang terbatas untuk periode tertentu. Beberapa lembaga menggunakan batasan waktu hingga 5 tahun sebelum ditarik atau dialihkan ke jenis tidak terikat (Ruppel, 2007).

- **Terikat permanen**

Karakteristik jenis ini mengharuskan entitas nirlaba untuk mengalokasikan ke jenis aset tertentu, menjaga secara permanen dan membolehkan mengambil manfaat darinya, contohnya adalah wakaf. Hasil dari investasinya dapat diklasifikasikan sebagai tidak terikat atau terikat sementara.

# Tujuan Laporan keuangan

- Tujuan utama → menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba.
- Untuk menyajikan informasi mengenai:
  - Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi.
  - Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih.
  - Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya.
  - Cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya.
  - Usaha jasa suatu organisasi.

# Laporan Posisi Keuangan

- Tujuan → untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, serta aset neto dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu.
- Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak-pihak lain untuk menilai:
  - kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan
  - likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.
- Laporan posisi keuangan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto:
  - menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas, dan liabilitas berdasarkan tanggal jatuh tempo;
  - mengelompokkan aset ke dalam lancar dan tidak lancar, dan liabilitas ke dalam jangka pendek dan jangka panjang;
  - mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh temponya liabilitas, termasuk pembatasan penggunaan aset, pada catatan atas laporan keuangan.

# Klasifikasi Aset Neto

- Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu: terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat.
- Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan.

# Tujuan Laporan Aktivitas

- Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai :
  - pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih,
  - hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain,
  - bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa,
- Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lainnya untuk:
  - mengevaluasi kinerja dalam suatu periode,
  - menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa,
  - menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.

# Laporan Aktivitas

- Laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode.
- Perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan.
- Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode.
- Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto, kecuali diatur berbeda oleh SAK lain atau SAK ETAP.

# Klasifikasi Laporan Aktivitas

- Laporan aktivitas menyajikan:
  - pendapatan sebagai penambah aset neto tidak terikat
  - beban sebagai pengurang aset neto tidak terikat.
- Sumbangan disajikan sebagai penambah aset neto tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, bergantung pada ada tidaknya pembatasan.
- Sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat → disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi.
- Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aset lain (atau liabilitas) sebagai penambah atau pengurang aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.

# Informasi Pemberian Jasa

- Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung.
- Dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya.
- Program pemberian jasa merupakan aktivitas untuk menyediakan barang dan jasa kepada para penerima manfaat, pelanggan, atau anggota dalam rangka mencapai tujuan atau misi entitas nirlaba.
- Pemberian jasa tersebut merupakan tujuan dan hasil utama yang dilaksanakan melalui berbagai program utama.

# Laporan Arus Kas

- Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.
- Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas dengan tambahan berikut ini:
  - Aktivitas pendanaan:
    - penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang.
    - penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi (endowment).
    - bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.
  - Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas: sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi.



**ISU  
LAPORAN  
KEUANGAN  
ENTITAS NON LABA**

# Standar Akuntansi yang Digunakan



- Yayasan didirikan untuk menaungi lembaga Pendidikan atau rumah sakit.
- Standar akuntansi yang akan dipilih:
  - PSAK
    - Jika Yayasan tersebut berskala nasional / internasional
    - Membutuhkan akuntabilitas yang luas
    - Kegiatan organisasinya kompleks, misalnya ada perusahaan yang dibentuk dan dimiliki oleh Yayasan tersebut
  - SAK ETAP
    - Jika Yayasan tersebut berskala nasional / internasional dan akuntabilitasnya terbatas
    - Kegiatan organisasinya tidak kompleks
  - SAK EMKM
    - Tidak disarankan karena Entitas Sektor Publik mestinya memiliki Akuntabilitas Publik



# Nama Laporan Keuangan

- Apakah entitas berorientasi nonlaba boleh laporan keuangannya sesuai dengan PSAK 45, saja hanya 4 laporan keuangan.
- Komponen dan nama laporan keuangan
  - Komponen laporan keuangan sebaiknya mengikuti PSAK 1 tetap lengkap sebanyak 5 laporan → menambahkan Laporan Perubahan Aset Neto.
  - Untuk nama Laporan Aktivitas dapat dipertahankan atau dapat menggunakan nama lain jika Entitas ingin merubahnya.
  - Penggunaan nama akun aset neto dan pembatasan aset neto: dapat dipertahankan jika keadaan EBNL mencerminkan kondisi tersebut. Namun dapat juga dirubah karena nama lain lebih tepat, misal tetap menggunakan nama ekuitas karena EBNL ini dimiliki atau bagian dari entitas pemerintah dan sehingga merupakan bagian dari kekayaannya milik negara.
- Jika tidak ada perubahan lain dalam aset neto, kecuali yang telah disajikan dalam laporan aktivitas, entitas diperkenankan tidak menyajikan laporan perubahan aset neto. Perubahan aset neto secara otomatis akan menambah saldo awal aset neto untuk menghasilkan aset neto akhir di laporan posisi keuangan (Ref SAK ETAP)

# Konsolidasi Laporan Keuangan



- Yayasan memiliki unit bisnis yang beorientasi non laba misalkan memiliki perusahaan komersial
- Standar akuntansi yang akan dipilih:
  - PSAK
    - Laporan keuangan Yayasan harus mengkonsolidasikan entitas bisnis yang dimilikinya dalam laporan keuangan Yayasan tersebut.
  - SAK ETAP
    - Kepemilikan perusahaan akan diakui sebagai investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas
    - Penggunaan metode ekuitas akan menghilangkan pelaporan aktivitas perusahaan di bawah Yayasan dengan lebih jelas, karena tidak terlihat nilai pendapatan, beban, aset dan liabilitasnya dalam LK Yayasan.



# Imbalan Kerja

- Apakah yayasan mengakui kewajiban imbalan pasca kerja untuk pekerjanya.
- Yayasan seperti halnya memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan perjanjian kontraktual dengan pekerja atau UU Ketenakerjaan.
- Semua konsekuensi pembayaran kepada pekerja diakui dalam laporan keuangan:
  - Jika dalam perjanjian kontrak kerja, pekerja mendapat hak memperoleh pensiun dan pesangon di akhir masa kerja maka akan diakui kewajiban imbalan pasti.
  - Jika tidak ada ketentuan tersebut dalam kontrak kerja, maka akan dihitung kewajiban imbalan pasti sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan
- Entitas mengakui kewajiban imbalan pasti sesuai dengan ketentuan PSAK / SAK ETAP

# Apakah Yayasan Membayar Pajak



- Tidak ada dalam ketentuan UU Pajak Penghasilan yang mengecualikan Yayasan sebagai subyek pajak.
- Kriteria dari badan sebagai subjek pajak dalam UU Pajak Penghasilan antara lain adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, **yayasan**, **organisasi massa**, **organisasi sosial politik** atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
- Yayasan memiliki kewajiban pajak
  - Atas penghasilan yang netto yang diperoleh akan dikenakan pajak dan dilaporkan dalam SPT tahunan.
  - With holding sebagai pihak yang dipotong - atas penghasilan yang diterima dari pihak lain, akan dpotong pajak
  - With holding sebagai pihak yang memotong pajak - saat membayarkan biaya yang merupakan penghasilan pihak lain memiliki kewajiban memotong pajak – PPh 21; PPh 23; PPh 4(2)
- Ketentuan khusus berlaku untuk Yayasan penyelenggara pendidikan



# Apakah Yayasan Pendidikan Membayar Pajak



- Yayasan Pendidikan seperti yayasan yang lain, namun ada beberapa pengecualian terkait penghasilan yang diterima dan pajak atas surplus yang diinvestasikan pada sarana dan prasarana Pendidikan dan pengembangan.
- Pengecualian penerimaan yang tidak dikenakan pajak penghasilan yang merupakan insentif pajak dari pemerintah, yaitu diantaranya;
  - Keuntungan berupa selisih antara harga pasar dan nilai perolehan atau nilai sisa buku atas pengalihan harta berupa bantuan atau sumbangan dan hibah yang diterima oleh badan pendidikan
  - Harta hibah yang diterima oleh badan pendidikan
  - Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, mendapatkan fasilitas perpajakan berupa pengecualian pengenaan pajak sepanjang sisa lebih tersebut ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikandan/atau penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada pihak manapun dan memenuhi syarat tertentu lainnya. Penanaman kembali sisa lebih dimaksud harus direalisasikan paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak sisa lebih (laba neto kena pajak) tersebut diterima atau diperoleh.
- Penggunaan surplus
  - Pembelian atau pembangunan gedung dan prasarana pendidikan, penelitian dan pengembangan termasuk pembelian tanah sebagai lokasi pembangunan gedung dan prasarana tersebut;
  - Pengadaan sarana dan prasarana kantor, laboratorium dan perpustakaan,
  - Pembelian/pembangunan asrama mahasiswa, rumah dinas guru, dosen atau karyawan, dan sarana prasarana olahraga, sepanjang berada di lingkungan/lokasi lembaga pendidikan formal.
- Apabila lembaga pendidikan memperoleh penghasilan di luar donasi dan sumbangan yang diberikan kepada badan (lembaga) pendidikan tersebut, maka atas penghasilan yang diterimanya terutang pajak.



*Thank  
You*

**Dwi Martani - 081318227080**  
**[martani@ui.ac.id](mailto:martani@ui.ac.id) atau [dwimartani@yahoo.com](mailto:dwimartani@yahoo.com)**  
**<http://staff.blog.ui.ac.id/martani/>**



**BACK UP SLIDE**

# The Characteristic of Public Sector Entities

## Public accountability

- Governments are **elected through a democratic process** to be granted constitutional or devolved rights, powers and responsibilities.
- Governments and their institutions **use public resources** and may have been **given delegated powers and responsibilities** that also demand broad **accountability to the public**.
- **Public accountability** is an overriding feature of public sector entities and ensuring the **availability of information to demonstrate such accountability** is the primary objective of public sector reporting.

# The Characteristic of Public Sector Entities

## Public accountability typically encompasses:

- A conferred responsibility
- An obligation to report back on the discharge of that responsibility
- Monitoring to warrant accountability and
- Potential sanctions for non-performance.

## Multiple objectives - not include generating a profit. Instead they are to:

- Provide service
- Facilitate resource reallocation and/or
- Undertake policy development.

# The Characteristic of Public Sector Entities

## Rights and responsibilities

- The rights and responsibilities of governments provide them the ability, directly and indirectly to affect the economy and society they operate in.
- Governments can, for example:
  - tax and set fiscal policy
  - penalize and fine
  - set monetary policy
  - make and enforce laws and regulations.
- In exchange, governments have the responsibility to, for example;
  - meet their constitutional or devolved duties
  - set policies to manage the socio-economic issues of the jurisdiction in an efficient, effective, sustainable and transparent manner through the stewardship and application of the public resources entrusted to them
  - deliver services and reallocate resources
  - be accountable for the efficient, effective, sustainable and transparent stewardship and use of the public.

# The Characteristic of Public Sector Entities

## Lack of equity ownership

- Public sector entities do not act to enhance the economic position of the entity for the benefit of owners.

## Operating and financial frameworks set by legislation

- Public sector entities must operate within and illustrate their compliance with legal requirements.
- Transparent and public accountability against the policy objectives and policies set out in legislation underlies public sector reporting

# The Characteristic of Public Sector Entities

## Importance and use of budgets

- Most governments prepare and make publicly available, their financial budgets.
- The budget mirrors the financial elements of the government's plans for the forthcoming period.
- It is the key tool for financial management and control, and is the central component of the process that provides for government and legislative oversight of the financial dimensions of operations.

## Governance structures

- Governance is provided by the legislature and comprises elected officials.

# The Characteristic of Public Sector Entities

## Nature of resources

- Resources of public sector entities are generally held for service provision rather than for their ability to generate future cash flows.

## Non-exchange transactions

- Some of the rights and responsibilities of public sector entities give rise to non-exchange transactions.

## Relationship to statistical reporting

- Relationship to statistical reporting, and the commonalities and differences between general purpose financial statements (GPFS) and government finance statistics (GFS).

## The longevity of the public sector

- The longevity of the public sector and the nature of public sector programmes, makes an increased need for information about the long term sustainability of a public sector entity's finances.